

ANALISIS PEMANFAATAN E-MUSRENBANG DKI JAKARTA SEBAGAI SARANA PARTISIPATIF DALAM PROSES PEMBANGUNAN

Rizka Luluatul Hasanah^{*1}, Shalwa Azahra², Aisyah Dwi Aprilia³, Nurdin⁴

^{1,2,3,4} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta, Indonesia.

*Corresponding Author: 2310413003@mahasiswa.upnvj.ac.id

<p>Info Article</p> <p>Received : 10 April 2025</p> <p>Revised : 01 Mei 2025</p> <p>Accepted : 16 Juni 2025</p> <p>Publication : 30 Juni 2025</p>	<p>Abstract. <i>This research aims to analyze the utilization of DKI Jakarta E-Musrenbang as a participatory tool in the regional development planning process. E-Musrenbang comes as a digital innovation that supports transparency, efficiency, and direct community involvement through information technology. This research uses a descriptive qualitative approach with secondary data analyzed to understand the effectiveness of application implementation as well as the driving and inhibiting factors for its use. The results of this study show that E-Musrenbang is able to improve accessibility and transparency in conveying aspirations from the community. However, it is still not free from challenges such as low digital literacy, limited infrastructure, lack of socialization, and weak follow-up to community proposals are still significant obstacles in optimizing public participation. The findings are expected to be an input for the development of more inclusive and participatory public policies in the digital era.</i></p>
<p>Keywords: E-Government, E-Musrenbang, Community Participation</p> <p>Kata Kunci: E-Government, E- Musrenbang, Partisipasi Masyarakat</p>	<p>Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan E-Musrenbang DKI Jakarta sebagai sarana partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan daerah. E-Musrenbang hadir sebagai inovasi digital yang mendukung transparansi, efisiensi, dan keterlibatan masyarakat secara langsung melalui teknologi informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder yang dianalisis untuk memahami efektivitas implementasi aplikasi serta faktor pendorong dan penghambat penggunaannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa E-Musrenbang mampu meningkatkan aksesibilitas dan transparansi dalam menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Namun, tantangan hal tersebut masih belum terlepas dari tantangan seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, minimnya sosialisasi, hingga lemahnya tindak lanjut terhadap usulan masyarakat masih menjadi hambatan signifikan dalam optimalisasi partisipasi publik. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif di era digital.</p>
<p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	

INTRODUCTION

Kontribusi masyarakat pada proses perencanaan pembangunan adalah salah satu aspek penting untuk mencapai good governance. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui e-government telah menjadi solusi yang diharapkan dapat memperbaiki dan mempercepat proses tersebut. E-government berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel dan partisipatif (Elvia, 2025). Hal ini menarik diteliti karena implementasi e-government yang sedang berkembang di Indonesia adalah E-Musrenbang yang digunakan untuk meningkatkan kontribusi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebuah forum yang diadakan setiap tahun oleh pemerintah daerah untuk merumuskan rencana pembangunan daerah (Baik, 2024).

Di DKI Jakarta pengadaaan E-Musrenbang memiliki manfaat untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka terkait pembangunan daerah (Dewangga, 2022). Dengan E-Musrenbang ini, masyarakat dapat mengajukan usulan pembangunan secara langsung melalui perangkat mobile mereka tanpa harus menunggu forum Musrenbang konvensional yang sering kali terbatas oleh waktu maupun ruang. Hal ini menjadi krusial karena tantangan dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat yang seringkali terkendala oleh keterbatasan akses informasi dan ketidaktahuan masyarakat mengenai jalur komunikasi yang tepat untuk menyampaikan aspirasi. Fenomena penggunaan teknologi dalam meningkatkan partisipasi publik ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Negara lain di dunia juga mulai mengadopsi sistem e-government untuk memperbaiki kualitas pemerintahan dan memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif. Misalnya di beberapa negara maju seperti Estonia dan Kanada, aplikasi berbasis teknologi telah terbukti dapat mengoptimalkan partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan dan mengurangi ketimpangan dalam pengambilan keputusan (Wattimena, 2024). Penerapan sistem ini di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan khususnya terkait dengan adopsi teknologi oleh masyarakat terutama di daerah-daerah dengan tingkat literasi digital yang rendah.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah meneliti dampak teknologi informasi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Mengungkapkan bahwa penggunaan aplikasi E-Musrenbang di Jakarta berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya dalam hal penyampaian usulan. Meskipun aplikasi ini memberikan kemudahan, penelitian tersebut juga menunjukkan

bahwa kesadaran masyarakat akan aplikasi ini masih rendah dan masih banyak warga yang lebih memilih untuk berpartisipasi melalui cara-cara tradisional seperti menghadiri pertemuan langsung. Penelitian ini mengusulkan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap penggunaan E-Musrenbang dengan fokus pada perbaikan sistem pelaporan dan peningkatan akses bagi kelompok masyarakat yang kurang terjangkau.

Penelitian ini menggunakan teori E-Government dan E-Participation. E-Government Rachmad et al., (2024) dalam bukunya berjudul “Layanan Dan Tata Kelola E-Government: Teori, Konsep Dan Penerapan” menjelaskan bahwa E-Government adalah melibatkan penggunaan teknologi dalam menjalankan sistem pemerintahan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada warga negara. Penerapan E-Government ini mencakup pengembangan portal online, peningkatan transparansi dan peningkatan partisipasi warga negara untuk ikut terlibat berkontribusi dalam pemerintahan publik. Dengan adanya E-Government akan memudahkan interaksi pemerintah dengan warga sekaligus nantinya mempercepat proses penyelenggaraan layanan publik sejalan dengan peningkatan efisiensi. Menurut Indrajit (2005) E-Government adalah usaha penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan obyektif bersama sejumlah kepentingan bersama. Penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi dapat meningkatkan kinerja pemerintahan terutama interaksi kepada warga, komunitas, dan kelompok bisnis untuk mencapai good governance (Anindito et al., 2022). Menurut Brown dan Brudney (2001) E-government mencakup penggunaan teknologi informasi khususnya berupa aplikasi berbasis web dengan tujuan utama untuk meningkatkan akses serta efisiensi penyampaian informasi dan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat luas. Konsep e-government sendiri mencakup berbagai interaksi yaitu e-government dapat memfasilitasi desentralisasi dan demokrasi dengan upaya meningkatkan akses informasi dan partisipasi masyarakat. Sejalan dengan konsep demokrasi yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan lingkup pemerintahan.

Dalam kasus penelitian ini E-Musrenbang DKI Jakarta, diluncurkan ke publik bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tata kota Jakarta. Perencanaan dan pengambilan keputusan terkait tata kelola kota Jakarta harus melibatkan partisipasi masyarakat, dikarenakan masyarakat lah yang akan menikmati dampaknya secara langsung. Dengan adanya E-Musrenbang DKI Jakarta diharapkan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan kebutuhan pembangunan di wilayah mereka tinggal. Teori E-Government ini relevan dengan kasus

penelitian karena aplikasi diterbitkan oleh pemprov Jakarta sebagai proses menuju pemerintahan berbasis digital mengikuti perkembangan zaman.

E-Participation, Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya sekelompok anggota masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat, masyarakat ikut andil dalam pemecahan masalah yang terjadi di lingkungan mereka tinggal, diikutsertakan dalam pengambilan keputusan sebagai solusi permasalahan yang terjadi (Damayanti et al., 2021). Partisipasi masyarakat dalam pembuatan, pengambilan dan mengevaluasi kebijakan yang ada merupakan ciri khas dari kepribadian bangsa Indonesia. Partisipasi yang dimaksudkan disini adalah masyarakat menyampaikan aspirasi mereka dalam proses pembangunan wilayah yang mereka tempati. Menurut Shane (2004) bentuk partisipasi masyarakat dapat melalui teknologi sebagai salah satu upaya penguatan demokrasi. Ia memandang bahwa partisipasi ini disebut dengan e-participation. Konsep e-partisipasi masyarakat disini adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam suatu kegiatan atau proses, masyarakat mengambil bagian hak mereka untuk terlibat dalam suatu kegiatan yang dilakukan bersama melalui teknologi informasi dan komunikasi. Masyarakat dilibatkan untuk meningkatkan mutu hidup mereka dengan melibatkan mereka secara langsung dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Dalam kasus pembangunan di Jakarta masyarakat dapat berkontribusi langsung menyampaikan aspirasi mereka melalui E-Musrenbang DKI Jakarta. Adanya aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk aktif dalam proses pembangunan di kota Jakarta. Ini sebagai bentuk upaya yang dilakukan pemprov DKI Jakarta untuk lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat dengan menyediakan platform digital yang dapat digunakan, meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah dan efisiensi waktu.

Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji aspek keterlibatan masyarakat dalam proses penggunaan aplikasi dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penggunaan E-Musrenbang oleh masyarakat. Dengan merumuskan permasalahan Bagaimana efektivitas E-Musrenbang sebagai sarana partisipasi masyarakat serta apa saja faktor yang menjadi pendorong penghambat partisipasi masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi seperti E-Musrenbang DKI Jakarta. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih dalam pengembangan kebijakan publik yang lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat implementasi good governance di Indonesia.

METHOD

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang termasuk dalam fenomena yang diuji tanpa kuantifikasi. Menurut Sugiyono (2018:213), metode penelitian kualitatif didasarkan pada filosofi pasca-positif yang digunakan untuk menyelidiki kondisi ilmiah di mana para peneliti bertindak sebagai alat utama untuk pengumpulan dan analisis data. Selanjutnya, menurut Creswell (2018:35), pendekatan kualitatif termasuk data terbuka, koleksi teks atau analisis gambar, dan interpretasi pribadi dari hasil. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis pengadaan E-Musrenbang DKI Jakarta sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kontribusi warga kota dalam rencana pembangunan lokal kota. Pendekatan ini memungkinkan para peneliti untuk menjelaskan implementasi, manfaat, dan tantangan kedalaman penggunaan aplikasi secara digital dalam sistem perencanaan. Kemudian Data yang diperoleh yaitu dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber terdahulu dan terdokumentasi sebelumnya, baik dalam bentuk dokumen resmi, laporan, maupun jurnal yang telah terpublikasi. Data ini digunakan untuk mendukung dan memperkuat hasil penelitian dengan memberikan konteks yang lebih luas.

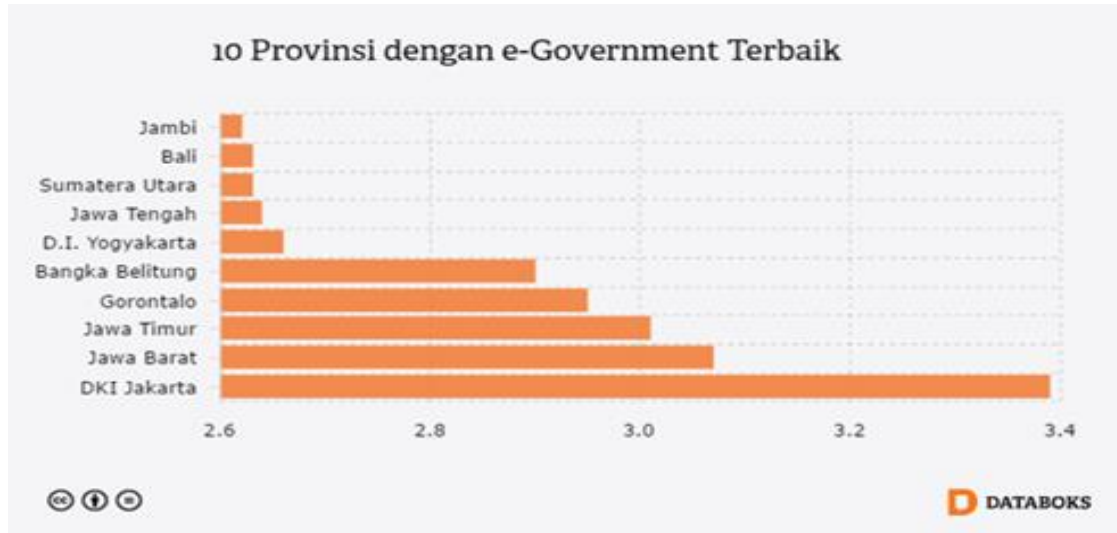
RESULTS AND DISCUSSION

1. E-Musrenbang Sebagai Sarana Partisipatif

Perencanaan dan pembangunan kota merupakan sebuah proses menuju tercapainya tujuan negara. Pembangunan tidak dapat berjalan sendiri secara spontan tanpa adanya keterlibatan beberapa pihak, disinilah peran pemerintah menjadi dominan. Peran pemerintah dalam memberikan fasilitas untuk masyarakat sebagai proses perencanaan pembangunan. Fasilitas yang diberikan harus sejalan dengan perkembangan zaman terutama pada era globalisasi, teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong percepatan proses dan mempermudah segala aktivitas manusia. Selain adanya peran pemerintah sebagai penggerak, teknologi disini berperan untuk menghasilkan dampak yang besar. Salah satu pemanfaatan teknologi oleh pemerintah khususnya teknologi informasi adalah aplikasi yang terhubung dengan internet (Rika Widianita, 2023).

Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi yang sudah memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan pemerintahannya. Salah satu contohnya adalah Aplikasi E-Musrenbang Mobile yang diluncurkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta pada

tahun 2022 sebagai inovasi pengembangan dari E-musrenbang berbasis website peluncuran 2015. Adanya pengembangan yang menjadi inovasi dalam menyempurnakan pelayanan publik berbasis teknologi bagi masyarakat Provinsi DKI Jakarta telah menunjukkan bahwa penerapan e-government dinilai sudah baik.

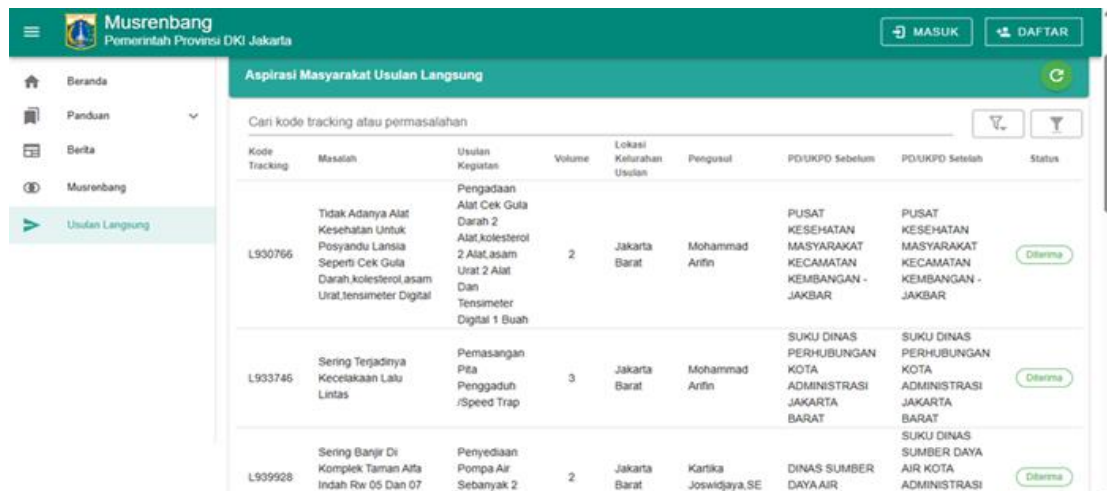


Sumber : <https://databoks.katadata.co.id>

Gambar 1 Grafik Penilaian Provinsi Pengguna E-Government

Diambil dari databoks (2016) Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi yang memegang penerapan e-government terbaik. Hasil ini menunjukkan Provinsi DKI Jakarta telah berhasil menjalankan pemerintahan dengan berbasis teknologi memudahkan masyarakat untuk mengakses segala informasi yang berkaitan dengan pemerintahan serta mendapatkan pelayanan yang lebih cepat. Dengan adanya E-Musrenbang pelayanan publik akan semakin membaik, meningkatkan aksesibilitas, transparansi dan efisiensi. Sejalan dengan konsep e-government yang disampaikan oleh Indrajit (2005) E-Musrenbang ini dinilai akan memudahkan masyarakat untuk mengakses menyampaikan aspirasi mereka terkait pembangunan tanpa harus melalui pertemuan fisik, sehingga ini jelas lebih memperluas jangkauan partisipasi masyarakat. Transparansi yang ditawarkan oleh E-Musrenbang terkait proses pengusulan dan pemantauan usulan pembangunan dapat dilihat oleh seluruh masyarakat secara online. Mengikuti teori E-Participation Shane (2004) Aplikasi ini menyediakan platform bukan hanya terkait proses tetapi disini masyarakat dapat berpartisipasi secara online untuk menyampaikan usulan pembangunan. Hal ini meningkatkan dialog dua arah pemerintah dengan masyarakat sehingga nantinya masyarakat merasa dirinya dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. Dan untuk sisi efisiensi, digitalisasi proses pengumpulan data aspirasi mengurangi birokrasi dan mempercepat pengolahan usulan, yang pada

akhirnya meningkatkan efektivitas hasil pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Peranan yang diambil dengan peluncuran aplikasi ini memperbaiki kualitas pelayanan publik sebagaimana penjelasan teori e-government (Agung Manghayu, 2018).



The screenshot shows the 'Aspirasi Masyarakat Usulan Langsung' (Direct Community Proposal) interface. It features a search bar for tracking codes or issues, a table of proposals, and navigation buttons for 'MASUK' (Login) and 'DAFTAR' (Register). The table lists three proposals with their respective details.

Kode Tracking	Masalah	Usulan Kegiatan	Volume	Lokasi Kelurahan Usulan	Pengusul	POUKPD Sebelum	POUKPD Setelah	Status
L930766	Tidak Adanya Alat Kesehatan Untuk Posyandu Lansia Seperti Cek Gula Darah, kolesterol, asam Urat, tensimeter Digital	Pengadaan Alat Cek Gula Darah 2 Alat, kolesterol 2 Alat, asam Urat 2 Alat Dan Tensimeter Digital 1 Buah	2	Jakarta Barat	Mohammad Arifin	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEMBANGAN - JAKBAR	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEMBANGAN - JAKBAR	Diterima
L933746	Sering Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	Pemasangan Pita Penggaduh /Speed Trap	3	Jakarta Barat	Mohammad Arifin	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	Diterima
L939928	Sering Banjir Di Komplek Taman Alfa Indah Rer 05 Dan 07	Penyediaan Pompa Air Sebanyak 2	2	Jakarta Barat	Kartika Joswidjaya, SE	DINAS SUMBER DAYA AIR	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI	Diterima

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025

Gambar 2. Tampilan E-Musrenbang DKI Jakarta

Bisa dilihat tampilan sistem E-Musrenbang DKI Jakarta telah menunjukkan transparansi, mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi menyampaikan permasalahan yang ada di lingkungan mereka melalui sistem digital. Usulan yang disampaikan oleh masyarakat langsung sampai kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga langsung mendapatkan respon yang diinginkan. Banyaknya usulan yang disampaikan masyarakat mendapatkan respon “diterima” oleh pemerintah, hal ini menandakan bahwa pemerintah menyediakan fasilitas seperti E-Musrenbang tidak hanya sekedar formalitas tetapi usulan tersebut direalisasikan sebagaimana mestinya.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Penggunaan E-Musrenbang

E-Musrenbang merupakan bentuk inovasi digital dalam sistem perencanaan pembangunan Indonesia yang dirancang untuk meningkatkan inklusivitas, efisiensi, dan aksesibilitas publik. Aplikasi ini hadir sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam proses perencanaan yang sebelumnya didominasi oleh pendekatan birokratis dan tatap muka. Dengan mengandalkan teknologi digital, E-Musrenbang menjembatani keterlibatan warga secara langsung dalam pengambilan keputusan pembangunan, menjadikan mereka sebagai subjek aktif, bukan lagi sekadar objek pembangunan (Saputri & Simbolon, 2023).

Salah satu faktor pendorong utama penggunaan aplikasi ini adalah kemampuannya dalam memperluas akses partisipasi. Melalui perangkat mobile,

masyarakat dari berbagai latar belakang dapat menyampaikan aspirasi kapan saja dan di mana saja. Implementasi E-Musrenbang di sejumlah daerah, menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah dan kualitas usulan yang disampaikan warga setelah digitalisasi proses ini. Kemudahan akses ini menjadi langkah penting dalam menjangkau kelompok-kelompok yang sebelumnya sulit terlibat, termasuk generasi muda dan masyarakat di wilayah terpencil (Rizkiya et al., 2023). Selain aksesibilitas, keunggulan lain dari E-Musrenbang terletak pada integrasi teknologi geospasial. Teknologi ini memungkinkan pemetaan lokasi usulan pembangunan secara lebih presisi, sehingga perencanaan dapat difokuskan pada kebutuhan nyata di lapangan. Fitur ini juga memperkaya analisis perencanaan dengan pendekatan berbasis data, bukan hanya pertimbangan subjektif. Data spasial yang dihasilkan membantu pemerintah dalam menetapkan prioritas pembangunan yang berbasis wilayah, mengurangi ketimpangan, dan memperkuat keadilan distribusi program pembangunan (Mashudi & Paselle, 2024).

Faktor krusial lainnya adalah aspek transparansi dan akuntabilitas yang ditawarkan oleh platform ini. Masyarakat dapat memantau perkembangan usulan mereka secara terbuka dan real-time melalui sistem yang tersedia, sehingga memperkuat rasa memiliki terhadap proses pembangunan. Keterbukaan informasi ini menjadi jembatan dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus mendorong pengawasan publik yang sehat (Herlinda, 2019). Secara keseluruhan, E-Musrenbang menjadi tonggak penting dalam transformasi tata kelola pemerintahan menuju sistem yang lebih partisipatif, transparan, dan responsif terhadap aspirasi warga

Efektivitas pelaksanaan dari setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam implementasinya sangat dipengaruhi oleh metode penyampaian atas sebuah program atau kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana program atau kebijakan kepada kelompok sasaran atau target dari kebijakan yang dibuat. Hal tersebut dilakukan agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat disosialisasikan secara baik (Rafinzar & Kismartini, 2020). Penggunaan sistem E-Musrenbang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan, dengan aplikasi E-Musrenbang data-data yang berisi usulan masyarakat terklasifikasi dengan baik sehingga meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang relevan dan akurat (Rohmatulloh & Riharjo, 2018).

Namun, Dalam pelaksanaannya di DKI Jakarta masih dihadapkan pada sejumlah kendala yang berpengaruh terhadap efektivitas dan kualitas hasilnya. Salah satu hambatannya adalah tingkat partisipasi warga yang masih rendah. Banyak masyarakat belum memahami pentingnya peran mereka dalam Musrenbang, sehingga minat untuk

terlibat juga minim. Jadwal kegiatan yang tidak fleksibel menjadi alasan warga sulit hadir dalam forum ini. (Fakhira & Salam, 2023) menunjukkan bahwa di beberapa wilayah, minimnya sosialisasi serta waktu pelaksanaan yang kurang tepat turut memengaruhi kehadiran dan keterlibatan masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan Musrenbang secara digital melalui aplikasi E-Musrenbang juga terhambat oleh keterbatasan literasi digital dan akses teknologi. Tidak semua warga memiliki perangkat dan kemampuan untuk menggunakan platform tersebut, terutama kelompok lansia dan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. (Tambah Pinter, 2023) mengungkapkan bahwa keterbatasan ini menimbulkan kesenjangan digital dalam proses perencanaan pembangunan yang seharusnya inklusif. Lalu hambatan yang terjadi adalah minimnya kejelasan tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat. Sering kali usulan yang diajukan masyarakat tidak mendapat respons yang jelas dari pemerintah daerah, sehingga menimbulkan rasa kecewa dan ketidakpercayaan. Menurut DPRD DKI Jakarta (2024) tidak adanya penjelasan mengenai alasan penolakan atau penundaan pelaksanaan usulan membuat masyarakat merasa tidak didengar oleh pemangku kebijakan. Lalu hambatan yang paling sangat menonjol yang juga menjadi penghambat utama adalah terbatasnya kemampuan teknis aparatur dan infrastruktur penunjang. Kurangnya pelatihan bagi petugas kelurahan serta belum meratanya akses internet di beberapa wilayah turut menyulitkan pelaksanaan E-Musrenbang secara maksimal. Di samping itu, koordinasi antar pihak yang masih lemah sering memicu tumpang tindih antara usulan masyarakat dan program pemerintah yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini membuat proses penentuan prioritas pembangunan menjadi tidak sinkron sehingga menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan E-Musrenbang di Jakarta.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas E-Musrenbang sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di DKI Jakarta, dapat disimpulkan bahwa penerapan teknologi informasi melalui aplikasi E-Musrenbang telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagaimana konsep e-government dan e-participation. E-Musrenbang mempermudah masyarakat untuk menyampaikan usulan pembangunan secara langsung, tanpa batasan ruang dan waktu, serta memungkinkan pemerintah untuk mengelola aspirasi masyarakat secara lebih efisien dan terstruktur. E-Musrenbang Mobile juga menunjukkan potensi besar dalam memperluas akses

partisipasi, terutama dengan pemanfaatan teknologi geospasial dan sistem pelaporan digital yang transparan. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat secara langsung. Selain itu, keterlibatan masyarakat secara digital menjadi langkah penting menuju perwujudan good governance di tingkat daerah. Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah hambatan yang masih mengganggu efektivitas implementasi E-Musrenbang. Hambatan tersebut meliputi rendahnya literasi digital, keterbatasan akses teknologi, minimnya sosialisasi, rendahnya partisipasi masyarakat, hingga kurangnya tindak lanjut atas aspirasi yang telah disampaikan. Kelemahan dalam koordinasi antar lembaga serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur juga menjadi tantangan yang perlu segera diatasi.

Oleh karena itu, dibutuhkan upaya berkelanjutan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan sosialisasi, memberikan pelatihan kepada aparatur dan masyarakat, memperkuat infrastruktur digital, serta menciptakan mekanisme yang lebih jelas dan responsif dalam menindaklanjuti setiap usulan masyarakat sehingga E-Musrenbang dapat berfungsi secara optimal sebagai media partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis dan inklusif di Indonesia.

REFERENCES

- Anindito, D. B., Sagala, S. A. H., & Tarigan, A. K. M. (2022). E-MUSRENBANG: A DIGITAL FRAMEWORK FOR LOCAL PARTICIPATORY PLANNING AT THE COMMUNITY LEVEL. *International Development Planning Review*, 44(2), 191–216. <https://doi.org/10.3828/IDPR.2021.5>
- Ardy Dwi Hardianto ; Besar Agung Martono. (2022). PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENDORONG PEMBERDAYAAN UNTUK PEMBANGUNAN MASYARAKAT YANG BERKELANJUTAN. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Damayanti, D., Halimah, M., & Rusli, B. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN APLIKASI ELECTRONIC MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (E-MUSRENBANG) DI KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 12(2), 46. <https://doi.org/10.24198/jane.v12i2.28681>
- Dewangga, F., Santoso, P. Y., Toruan, R. R. M. L., Widarini, D. A., & Wiyati, E. K. (2022). PROGRAM JAKARTA OPEN DATA SEBAGAI E-GOVERNMENT

- DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK HUMAS PEMPROV DKI JAKARTA. *Jurnal Cyber PR*, 2(1), 94–106. <https://doi.org/10.32509/cyberpr.v2i1.2129>
- Elvia, V., Adnan, M. F., & Khaidir, A. (2025). THE ROLE OF TECHNOLOGY IN ACHIEVING GOOD GOVERNANCE : A PUBLIC ADMINISTRATION THEORY PERSPECTIVE. 5(1), 199–206. <https://doi.org/10.58737/jpled.v5i1.400>
- Fakhira, R., & Salam, R. (2023). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KELURAHAN SAWAH KECAMATAN CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN. *Pentahelix*, 1(2), 143. <https://doi.org/10.24853/penta.1.2.143-154>
- Hasanuddin, D. Z. E. (2021). KOTA CERDAS UNTUK SIAPA? STUDI KASUS KANAL PARTISIPASI WARGA MEDAN, JAKARTA, DAN SURABAYA. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 17(2), 214–229. <https://doi.org/10.14710/pwk.v17i2.36541>
- Lailatun, I. (2018). PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM E-MUSRENBANG TERHADAP PARTISIPATIF SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(1), 1–17.
- Mashudi, E., & Paselle, E. (2024). EVALUASI EFEKTIVITAS PEMANFAATAN APLIKASI E-MUSRENBANG BERBASIS GEOSPASIAL DALAM PEMBANGUNAN DI KOTA BONTANG. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(6), 2061–2077. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i6.1196>
- Rafinzar, R., & Kismartini. (2020). INOVASI E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI PADA FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PROGRAM E-MUSRENBANG DI KOTA SURABAYA). *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 227–250. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/viewFile/3959/2783>
- Rika Widianita, D. (2023). Title. AT-TAWASSUTH: *Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- Rizki Nanda Saputri, & Simbolon, N. (2023). ANALYSIS OF MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) AS THE REALIZATION OF A PARTICIPATORY DEVELOPMENT PLANNING SYSTEM IN INDONESIA. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 2(1), 34–40. <https://doi.org/10.32734/mah.v2i1.11111>

- Rizkiya, P., Dzil Ikram, A., Arsitekur dan Perencanaan, J., Teknik, F., & Syiah Kuala, U. (2023). THE IMPACT OF E-MUSRENBANG IMPLEMENTATION ON DEVELOPMENT PLANNING PROCESS IN BANDA ACEH CITY, INDONESIA DAMPAK PENERAPAN E-MUSRENBANG TERHADAP PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA BANDA ACEH, INDONESIA. *Multidiciplinary Research*, 6(2), 140–146. <https://doi.org/10.52626/jg.v>
- Safira, E. (2022). PEMANFAATAN E-MUSRENBANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI TINGKAT KELURAHAN. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Politik [JIMSIPOL]*, 2(3), 1–12. <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimsipol/article/view/1468>